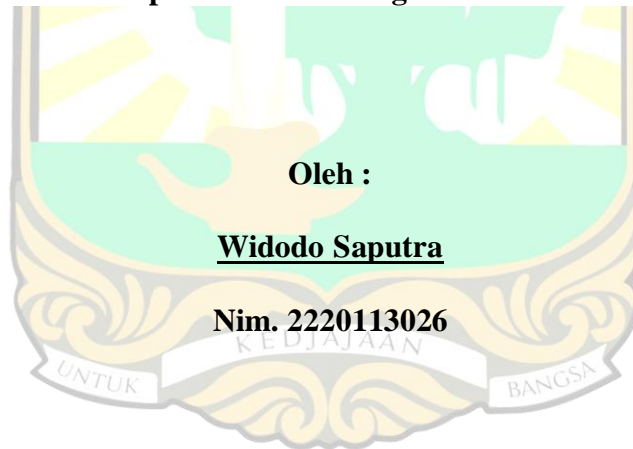




**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN  
EMAS TANPA IZIN DI KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum**



**Oleh :**

**Widodo Saputra**

**Nim. 2220113026**

**PROGRAM MAGISTER**

**HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

**2024**

## ABSTRAK

Emas merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Keterlibatan Negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Dikarenakan pertambangan emas merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dalam kenyataannya Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ) yang ada di Kabupaten Pasaman Barat semakin banyak terjadi. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara sudah jelas melarang kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin ( PETI ). Kegiatan dari para penambangan yang tidak memiliki izin ini sudah menjadi pekerjaan utama/ tetap. Dalam hal tertangkap tangan, maka yang dijerat adalah para pekerja saja tanpa menangkap pemilik modal yang selalu lepas dari jerat hukum. Kompleksitas masalah PETI merupakan masalah belum dapat di tuntaskan pada saat ini, penegakan hukum oleh Pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat sangat diperlukan dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan hidup dan memberi efek jera.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin?
- 2) Bagaimanakah struktur hukum untuk mengatasi pertambangan emas tanpa izin?
- 3) Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh Kepolisian Resor pasaman barat terhadap pertambangan emas tanpa izin?

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis emapiris maka peneliti ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Kepolisian Pasaman Barat.

Dari hasil penelitian dapat diketahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Pasaman Barat adalah tindakan atau usaha negara berdasarkan perangkatnya yang dimulai dari.1) Pengaturan hukum yang mengatur tentang pertambangan emas tanpa izin dan aturan pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin.2) Struktur hukum dalam penegakan hukum agar pelaksanaan penegakan hukum dapat terlaksana mulai dari penyelidikan sampai adanya putusan yang memberikan hukuman yang harus dijalani oleh pelaku pertambangan emas tanpa izin.3) Serta pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan tanpa izin, dan masyarakat juga ikut serta dalam melakukan pencegahan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut dengan cara melaporkan apabila mengetahui terjadinya kegiatan pertambangan emas tanpa izin kepada pihak penegak hukum.

Keywords: Law Enforcement, Unlicensed Gold Mining, community role

## **ABSTRACT**

Gold is a natural resource that has strategic value in the development of the nation and state. State involvement in structuring and developing and managing it is very much needed. Because gold mining is natural wealth controlled by the State and used for the welfare of the people as a whole. In reality, unauthorized gold mining (PETI) in West Pasaman Regency is increasingly occurring. Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal clearly prohibits gold mining activities without a permit (PETI). The activities of these unlicensed miners have become their main/permanent jobs. In the case of being caught red-handed, only the workers will be charged without arresting the capital owners who always escape the law. The complexity of the PETI problem is a problem that cannot be resolved at this time, law enforcement by the West Pasaman Resort Police is very necessary in an effort to prevent environmental damage and provide a deterrent effect.

Based on the background above, the problems that will be answered in this thesis research are:

- 1) What is the legal regulation regarding the criminal act of gold mining without a permit?
- 2) What is the legal structure to deal with gold mining without a permit?
- 3) What is the community's view of law enforcement by the West Pasaman Police regarding gold mining without a permit?

This type of research is empiric juridical research, so this research is descriptive in nature, namely research that explains in clear and detailed sentences about the Law Enforcement of the Crime of Gold Mining Without a Permit in the Legal Area of the West Pasaman Police.

From the research results, it can be seen that law enforcement regarding the criminal act of gold mining without a permit in the jurisdiction of the West Pasaman Police is an action or effort by the state based on its instruments starting from. 1) Legal regulations governing gold mining without a permit and criminal regulations that will be imposed on the perpetrators. gold mining without a permit. 2) The legal structure in law enforcement so that law enforcement can be carried out starting from the investigation until there is a decision that provides penalties that must be served by perpetrators of gold mining without a permit. 3) As well as the community's views on law enforcement in carrying out law enforcement. against perpetrators of mining without a permit, and the community also participates in preventing gold mining activities without a permit by reporting if they become aware of gold mining activities without a permit to law enforcement authorities.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Emas Tanpa Izin, peran masyarakat